

**MODEL KEBIJAKAN INKREMENTAL UNTUK MEWUJUDKAN
PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS
(Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu
Tahun 2018)**

(Skripsi)

Oleh

REZA ARDHIA CAHYANI



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

ABSTRAK

MODEL KEBIJAKAN INKREMENTAL UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2018)

Oleh:

Reza Ardhia Cahyani

Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap daerah untuk dapat berkembang pesat. Sebagai upaya pemerataan pendidikan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, telah melaksanakan standar mutu pendidikan dengan pedoman UU RI no 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan menyesuaikan dengan visi dan misi pemerintah Kabupaten Pringsewu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik penelitian yaitu teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik keabsahan data dan menggunakan informan penelitian untuk melengkapi data penelitian yang dilakukan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan standar mutu pendidikan yang dijalankan di Kabupten Pringsewu khususnya dalam pelaksanaan standar sarana dan prasarana pendidikan. Dalam penelitian ini, peniliti menggunakan teori model kebijakan inkremental yang dikembangkan oleh Lindblom. Hasil temuan dari penelitian ini mengungkapkn bahwa pelaksanaan model kebijakan inkremental di Kabupaten Pringsewu sudah cukup baik dimana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu sudah berupaya dalam memperbaiki standar mutu pendidikan yang kurang baik dan selalu berupaya untuk memenuhi fasilitas pendidikan dengan baik, adil dan merata.

Kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu sudah dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan di lapangan akan tetapi dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan sedikit terhambat dengan minimnya dana anggaran sehingga memperlambat proses untuk memperbaiki atau membangun fasilitas proses pembelajaran dan pelaksanaan pembelajaran di sekolah.

Kata Kunci : Standar Mutu, Sarana dan Prasarana

ABSTRACT

MODEL OF INKREMENTAL POLICY TO REACH QUALITY EDUCATION (STUDY ON EDUCATION AND CULTURE DEPARTMENT OF PRINGSEWU REGENCY IN 2018)

By

REZA ARDHIA CAHYANI

Education is one of the important sectors in development in each region to be able to develop rapidly. As an effort to equalize education, the Pringsewu District Education and Culture Office has implemented education quality standards with the guidelines of the Republic of Indonesia Law No. 20 of 2003 concerning the national education system and adjusting the vision and mission of the Pringsewu Regency government. In this study, researchers used research techniques namely data collection techniques, data analysis techniques, data validity techniques and using research informants to complement the research data conducted.

This study aims to determine the implementation of quality standards of education carried out in Pringsewu District, especially in the implementation of educational facilities and infrastructure standards. In this study, researchers used a theory of incremental policy models developed by Lindblom. The findings of this study revealed that the implementation of the incremental policy model in Pringsewu District was quite good where the Education and Culture Office of Pringsewu District had tried to improve the quality standards of education that were not good and always tried to meet educational facilities well, fairly and evenly.

The education policy carried out by the Pringsewu District Education and Culture Office has been carried out in stages and adjusted to the conditions of the needs on the ground but in the implementation of educational policies a little hampered by the lack of budget funds so that it slows the process to improve or build learning process facilities and implementation of learning in schools.

Keywords : *Quality standard, facilities and insfrastructure*

**MODEL KEBIJAKAN INKREMENTAL UNTUK MEWUJUDKAN
PENDIDIKAN YANG BERKUALITAS
(Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu
Tahun 2018)**

Oleh

REZA ARDHIA CAHYANI

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA ILMU ADMINISTRASI PUBLIK

Pada

Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**

Judul Skripsi : **MODEL KEBIJAKAN INKREMENTAL
UNTUK MEWUJUDKAN PENDIDIKAN
YANG BERKUALITAS (Studi Pada Dinas
Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten
Pringsewu Tahun 2018)**

Nama Mahasiswa : **Reza Ardhia Cahyani**

Nomor Pokok Mahasiswa : 1516041104

Jurusan : Ilmu Administrasi Negara

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik




Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.
NIP 19780923 200312 1 001


Ita Prihantika, S.Sos., M.A
NIP 19840630 201504 2 002

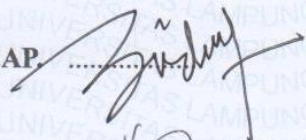
2. Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik


Dr. Noverman Duadji, M.Si.
NIP 19691103 200112 1 002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

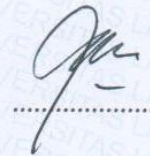
Ketua : **Eko Budi Sulistio, S.Sos., M.AP.**



Sekretaris : **Ita Prihantika, S.Sos., M.A**



Penguji Utama : **Nana Mulyana, S.IP., M.Si**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Syarif Makhya
NIP 19590803 198603 1 003

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **04 Oktober 2019**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi/Laporan akhir ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana/Ahli Madya), baik Universitas Lampung maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi yang berlaku di Perguruan Tinggi ini.

Bandar Lampung, 04 Oktober 2019

Yang membuat pernyataan,



Reza Ardhia Cahyani

NPM.1516041104

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Reza Ardhia Cahyani namun kerap disapa Reza sejak kecil, lahir di Kresnomulyo, 10 April 1997. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara, yang dilahirkan oleh pasangan Ayahanda Bahrodin dan Ibunda Ngusfuriah. Pada tahun 2001 penulis mulai mengenyam pendidikan Taman Kanak-Kanan Al-Basyr Sumberagung. Ambarawa. Kemudian melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar pada tahun 2003-2009 di SDN 1 Kresnomulyo. Selanjutnya Sekolah Menengah Pertama di SMPN 1 Ambarawa pada tahun 2009-2012. Sekolah Menengah Atas di SMAN 1 Pringsewu pada tahun 2012-2015. Kemudian diterima di Universitas Lampung, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Jurusan Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2015 melewati jalur Mandiri yang ada di Universitas Lampung. Selama menimba ilmu di Universitas Lampung, penulis juga turut aktif dalam beberapa organisasi kemahasiswaan. Keikutsertaan penulis dalam organisasi kampus dimulai sejak penulis bergabung dengan Koperasi Mahasiswa Universitas Lampung dimulai pada saat semester 2. Pada tahun 2018, penulis melaksanakan KKN di Desa Tanjung Aji, Kecamatan Wana, Kabupaten Lampung Timur selama 40 hari. Kegiatan KKN ini telah memberikan pengalaman yang berharga bagi penulis tentang fenomena empiris di lapangan berkaitan dengan bidang ilmu penulis.

Perjalan panjang dalam masa perkuliahan telah penulis lalui di kampus tercinta. Semua ini dilakukan penulis semata-mata karena ingin membahagiakan kedua orang tua, meski banyak masalah dan ujian yang dihadapi namun penulis tetap yakin bahwa ujian tersebut merupakan salah satu puncak kehidupan yang harus dihadapi, karena penulis yakin semua ujian dan masalah yang ada selalu memberikan pelajaran tersendiri bagi perjalanan hidup penulis.

PERSEMBAHAN

Bismillahirrohmanirrohim

Segala puji Allah S.W.T. yang telah memberikan kesempatan sehingga dapat kuselesaikan sebuah karya ilmiah ini dan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W. yang selalu kita harapkan Syafaatnya diakhir kelak.

Kupersembahkan hasil karyaku untuk kedua orang tuaku Bapak Bahrodin dan Ibu Ngusfuri'ah

Adiku tercinta Bilqis salwa arrifah

Serta Almamater Tercinta Universitas Lampung

MOTTO

“Banyak kegagalan hidup yang terjadi karena orang-orang tidak menyadari seberapa dekat kesuksesan mereka saat mereka menyerah.”

”

- Thomas A. Edison

“Mulailah dari mana anda berada, gunakan apa yang anda miliki dan lakukan apa yang anda bisa.”

-Arthur Ashe

“Tidak ada jalan mudah menuju kebebasan, dan banyak dari kita akan melewati lembah gelap yang menyeramkan. Lagi dan lagi sebelum akhirnya kita meraih puncak kebahagiaan.

- Nelson Mandela

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Model Kebijakan Inkremental untuk mewujudkan pendidikan yang Berkualitas (Studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu)”, sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Administrasi Publik (S.AP) di Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini antara lain :

1. Bapak Eko Budi Sulistio, S.Sos, M.AP selaku dosen pembimbing utama. Terima kasih pak atas bimbingan dan motivasi serta masukannya yang banyak membantu dan memotivasi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga ilmu yang telah diberikan selama perkuliahan. Terimakasih karena bapak tidak pernah mempersulit saya dalam bimbingan skripsi. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.
2. Ibu Ita Prihantika S.Sos, M.A. selaku dosen pembimbing kedua. Terima kasih ibu untuk segala masukan, saran, dan dukungan yang diberikan, serta waktu untuk bimbingan

sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis memohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan penulis yang sekiranya kurang berkenan.

3. Bapak Nana Mulyana, S.IP, M.Si selaku dosen pembahas. Terimakasih atas segala kritik, saran dan masukannya sehingga skripsi ini dapat terlihat lebih baik lagi.
4. Bapak Dr. Syarif Makhya selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung
5. Bapak Dr. Noverman Duadji, M. Si selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
6. Ibu Devi yulianti, S.A.N., M.A. selaku dosen pembimbing akademik . Terimakasih bu atas nasehat, arahan, motivasi, dan ilmu yang diberikan selama proses pendidikan hingga saat ini.
7. Kepada seluruh Dosen Jurusan Ilmu Adminstrasi Negara, Pak Bambang, Prof. Yulianto Pak Syamsul, Ibu Intan, Pak Dedy, Pak Simon, Ibu Meiliyana, Pak Ijul, Ibu Rahayu, Ibu Dian, Ibu Novita, Ibu Selvi, Ibu Dewi, dan Ibu Anisa, terimakasih banyak untuk semua ilmu yang telah diajarkan kepada penulis.
8. Pak Johari, dan Mba Wulan selaku staf Jurusan Ilmu Administrasi Negara yang selalu membantu dalam hal administratif. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya selama ini.
9. Terimakasih juga peneliti ucapkan kepada Bapak Eko Kusmiran, Bapak Eko Subagio, Bapak Rustiyan, Bapak Haiyin, Bapak Sakijo, Bapak Agus Dwinanto, Bapak Salamun, Bapak Wagiman, Bapak Abidin yang telah membantu penulis untuk menyelesaikan penelitian ini yang berperan sebagai informan penelitian yang sangat berperan dalam pengambilan data penelitian penulis.

10. Kedua orangtuaku, Ayahanda Bahrodin dan Ibunda Ngusfuri'ah. Terima kasih atas kasih sayang yang telah papa dan mama berikan kepadaku, terimakasih atas semua do'a, motivasi, pengorbanan, didikan yang selama ini kalian berikan kepadaku hingga aku bisa menjadi seperti sekarang ini. Terimakasih atas kepercayaan dan amanat yang selama ini kalian berikan kepadaku untuk menyelesaikan studiku sehingga aku bisa mencapai gelar Sarjana Administrasi Negara. Semoga dengan mendapatkan gelar S.AN ini aku bisa dengan segera mendapatkan pekerjaan yang dapat meningkatkan derajat kedua orangtua dan keluarga agar mampu membahagiakan Papa dan Mama, Aamiin.
11. Adiku Bilqis Salwa Arrifah terimakasih sudah menghiburku dikala pusing mengerjakan penelitian dan selalu menyemangatiku untuk segera menyelesaikan skripsi tersebut.
12. Terimakasih buat anak-anak bujang gadis S.A.N yang sudah menemani selama 4 tahun kuliah dan yang selalu menyemangati untuk segera menyelesaikan skripsi biar wisudanya bareng. Rini jangan terlalu cengeng inget umur sudah semakin menua dan jangan polos-polos amat sama laki karna terlalu polos sama sekali bisa saja diajarkan yang menurut lu baik tapi menurut orang lain itu enggak baik (kalok lu enggak maksud tanya sama guan anti gua jelasin sedetil mungkin). Tiwi jangan terlalu gaenakan sama orang yang ujung-ujungnya disakitin sama orang dan jangan ngebucin terus wi inget umur udah tua bukan lagi saatnya lu mikirin cinta terus pikirin sekarang gimana caranya biar bisa dapet kerjaan yang enak dan dapat gaji besar dan memuaskan. Pra jangan galak-galak sama rohaniah dia menahan kegelisahan kalok digalakin dan jangan terlalu maksain diri pra kalok emang enggak kuat ya istirahat biar enggak sakit-sakit terus inget beli obat itu mahal dan pait lagi rasanya tapi lu itu hoby bener ngemilin obat. Roh maapin gua ya yang sering gajelas sama lu karna emang kadang lu ngeselin sih jangan terlalu polos juga biar engk

dihianatin terus sama laki dan belajar nyari temen yang bener roh biar enggak ditipu terus. Ajeng jangan lupa diet ya biar makin bagus badanya hehe dan inget jeng jangan terlalu membanggakan diri sendiri berlebihan karna itu bisa membuat persepsi orang lain ke elu jadi negatif ini bukan omongan belaka haha. Bang dinan inget umur bang jangan maen cewe aja kerjain tuh skripsinya jangan ngegame sama maen aja banyakin dzikir bang biar dibukakan pintu menuju jalan yang benar. Atan kurang-kurangnya ngehayalnya tan takut ketinggian gabisa nyampe nanti lu stress. Om iyan jangan nonkrong aja om kerjanya jangan kebanyakan bareng sama atan nanti lu diajarin gila sama dia haha.

13. Temen julidku yang luar biasa Risda umami punya badan gede mukanya ganas galak banget kalok udah marah atau badmood udah kayak macan tapi melownya luar biasa cumin liat video sedih aja bisa langsung mewek ampun emang haha. Fita Muftihanaa badan tinggi skrng kurus kalok dulu gede gara-gara mau ke malang dia rela diet abis-abisan sampe makannya kayak kambing cuman sayuran tanpa rasa untung dia pemakan segala jadi sama dia bisa ditelen aja dia pinter dan sabar ldran haha tapi dia jahat ninggalin aku sama umami wisuda duluan.

14. Terimakasih buat Fuad Hariri yang sudah sabar menghadapi kegalakanku hamper 5 tahun ini terimakasih motivasi dorongan dan petuah-petuahnya yang kadang bikin kesel tapi emang bagus daan harus dilakuin biar bisa jadi lebih baik terimakasih sudah mengajarkan arti kesabaran, keikhlasan dan semua mengajarkan bahwa kita tidak boleh berharap kepada manusia itu salah satu kata yang selalu diucapkan disaat galau haha.

15. Terima Kasih Temen-temen kosan ku fitri unyil, Citra, Riski, Windi, Riza, Eka, Rini yang sudah menemani kegalauan ku dikosan dengan melakukan keributan dan kehebohan yang ada aja kelakuannya dan yang gabisa lepas dari ngomongin orang hahaha.

16. Teman-teman ATLANTIK yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu terimakasih sudah memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan selama masa perkuliahan berlangsung.
17. Okyana Giti Ananti terimakasih sudah menjadi temanku selama SMP tapi baru deket pas SMA terimakasih atas kadang ketidakjelasan dan motivasinya dalam menyelesaikan perkuliahan ini. Wanita tangguh, pekerja keras dan tahan banting.
18. Buat sepupuku terbaik ayu mawar terimakasih sudah selalu menyemangati dan mensupport dalam menyelesaikan skripsi ini , Yola Pamelina dan Fadhillah Alya Rahmalia adik sepupuku yang selalu mengejekku karena belum wisuda-wisuda berkat kalian berdua aku semangat untuk segera menyelesaikan skripsi ini.
19. Belleana Holy Rose dan Aprilia Ayu WN teman julidku pas SMA yang selalu menyemangati selalu dalam menyelesaikan skripsi ini. Dua wanita yang membuat aku menjadi sangat hoby makan bakso dimanapun tempat dan waktunya pasti yang dicari selalu bakso. Aku rindu boncengan motor bertiga gaessss.

BandarLampung, 04 Oktober 2019

Penulis

Reza Ardhia Cahyani

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kebijakan Publik.....	10
1. Pengertian Kebijakan Publik.....	10
2. Proses Kebijakan Publik	12
B. Model Kebijakan.....	13
1. Pengertian Model	13
2. Model-Model Kebijakan publik.....	14
3. Model Kebijakan Inkremental	20

C. Pendidikan.....	23
1. Konsep Pendidikan	23
2. Fungsi Pendidikan.....	25
3. Standar Mutu Pendidikan.....	26
III METODE PENELITIAN	29
A. Tipe dan Metode Penelitian	29
B. Fokus Penelitian.....	29
C. Lokasi Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data	32
E. Instrumen Penelitian	35
F. Teknik Pengumpulan Data.....	36
G. Teknik Analisis Data.....	39
H. Teknik Keabsahan Data	41
IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	47
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	47
1. Deskripsi Wilayah Kabupaten Pringsewu.....	47
1. Gambaran Umum Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu	50
B. Hasil Penelitian	55
1. Kebijakan Pendidikan	56
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.....	66
3. Ketercapaian hasil pelaksanaan	81
4. Memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan pendidikan.....	86
C. Pembahasan.....	91
1. Kebijakan Pendidikan	91
2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.....	95
3. Ketercapaian hasil pelaksanaan	98
4. Memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan pendidikan.....	100

V KESIMPULAN DAN SARAN	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA.....	108
LAMPIRAN.....	110

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. APM dan APK menurut jenjang pendidikan di Provinsi Lampung 2015.....	2
2. Daftar Dokumen Penelitian.....	34
3. Data Informan Penelitian.....	37
4. Daftar Dokumentasi Penelitian.....	38
5. Contoh Tabel Triangulasi.....	43
6. Daftar jumlah penduduk di Kabupaten Pringsewu berdasarkan Kecamatan dan jenis kelamin.....	50

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Rekapitulasi data sarana dan prasarana SD tahun 2018 Kab. Pringsewu.....	6
2. Rekapitulasi data sarana dan prasarana SMP tahun 2018 Kab. Pringsewu.....	7
3. Komponen dalam analisis data.....	41
4. Struktur organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu 2018.....	54
5. Pembangunan Ruang kelas baru pada tahun 2018.....	63
6. Rekapitulasi data yang menerima perbaikan/permbangunan sarana dan prasarana Tahun 2017.....	70
7. Rekapitulasi data yang menerima perbaikan/permbangunan sarana dan prasarana Tahun 2018.....	72
8. Pembangunan Rehab ruang kelas pada tahun 2018.....	73
9. Keadaan bangunan SD N 10 Bandung Baru sebelum mendapatkan perbaikan bangunan sarana dan prasarana.....	74
10. Kondisi Perpustakaan SD N 10 Bandung Baru.....	75
11. Rekapitulasi data yang menerima perbaikan/permbangunan sarana dan prasarana Tahun 2019.....	77
12. Pembangunan Rehab ruang kelas SMP.....	79
13. Hasil pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana Tahun 2018.....	85
14. Keadaan jamban/WC siswa dan keadaan ruang kelas yang tidak terpakai akibat mengalami kerusakan.....	87
15. Model Kebijakan Inkremental di Kabupaten Pringsewu dalam mewujudkan Pendidikan yang berkualitas.....	102

I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Megawanti (2015) mendeskripsikan pendidikan adalah hal terpenting bagi setiap negara untuk dapat berkembang pesat. Negara yang hebat akan menempatkan pendidikan sebagai prioritas pertamanya, karena dengan pendidikan, kemiskinan pada rakyat di negara tersebut akan dapat tergantikan menjadi kesejahteraan. Ketersediaan sumber daya alam (*natural resources*) yang melimpah dan adanya sumber daya modal serta teknologi yang semakin canggih, tidak akan mempunyai kontribusi yang bernilai tambah, tanpa didukung oleh adanya sumber daya manusia (*human resources*) yang berkualitas.

Muhardi (2004) menjelaskan sumber daya manusia merupakan aset utama dalam membangun suatu bangsa. Pendidikan merupakan salah satu sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia, sehingga kualitas sumber daya manusia sangat tergantung dari kualitas pendidikan. Sistem pendidikan di Indonesia, yang didasarkan pada sistem pendidikan nasional, terdapat kesenjangan antara cita-cita dan kenyataan. Hal ini dapat dilihat dari berbagai faktor seperti kelemahan pada sektor manajemen, dukungan pemerintah dan masyarakat yang masih rendah, efektifitas dan efisiensi pembelajaran yang masih lemah,

inferioritas sumber daya pendidikan, dan terakhir lemahnya standar evaluasi pembelajaran.

Febrianto dan Sulaiman (2014) mengatakan upaya peningkatan mutu dan pembangunan bidang pendidikan di era otonomi daerah bukan hanya merupakan tanggung jawab pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi, melainkan juga merupakan tanggung jawab pemerintah daerah. Kebijakan otonomi daerah, bagaimanapun akan membawa implikasi yang sangat besar dalam berbagai tatanan pemerintah, baik pusat dan daerah, tidak terkecuali dalam bidang pendidikan. Saat ini kondisi pendidikan di Lampung sudah cukup baik apabila dilihat dari angka partisipasi yang ada pada tabel dibawah ini, akan tetapi pendidikan yang baik dan berkualitas tidak hanya dilihat dari angka partisipasi murni ataupun kasar masih banyak hal yang harus dilihat seperti dari sistem kurikulum yang baik, kinerja guru yang baik dan profesional serta adanya sarana dan prasarana yang mendukung adalah hal yang sangat penting dan harus diperhatikan.

Tabel 1 Angka Partisipasi Murni (APM) dan Angka Partisipasi Kasar (APK) Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Lampung 2015

Jenjang Pendidikan	APM (Angka Partisipasi Murni)	APK (Angka Partisipasi Kasar)
SD	98.32	113.38
SMP	78.20	100.83
SMA/SMK/MA	58.39	73.90

(Sumber : BPS Provinsi Lampung, 2015)

Angka Partisipasi Kasar (APK), mengindikasikan partisipasi penduduk yang sedang mengenyam pendidikan sesuai jenjang pendidikannya. Angka APK ini

bisa lebih besar dari 100 persen karena populasi murid yang bersekolah di suatu jenjang pendidikan, mencakup anak diluar batas usia sekolah pada jenjang pendidikan yang bersangkutan. APK digunakan untuk mengukur keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan. Indikator APM ini digunakan untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan yang sesuai. Semakin tinggi APM berarti banyak anak usia sekolah yang bersekolah di suatu daerah pada tingkat pendidikan tertentu.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia. Undang Undang Republik Indonesia No 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Hal ini menunjukkan bahwa dimana pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Secara politis tekad pemerintah untuk membangun pelayanan pendidikan bagi seluruh masyarakat terlihat cukup besar. Persoalan pendidikan dasar muncul juga

ditingkat daerah. Kemampuan dan tekad pemerintah daerah yang saat ini memegang sebagian besar kewenangan dan tanggung jawab pengelolaan pendidikan dasar juga masih dihadapi banyak daerah dinilai belum sepenuhnya siap, kebanyakan mereka masih berada pada taraf sebagai pelaksana saja. Keadaan ini dipersulit oleh terbatasnya anggaran, sehingga untuk beberapa tahun kedepan pengelolaan dan pembangunan pendidikan di Indonesia diperkirakan belum akan mengalami perbaikan yang berarti.

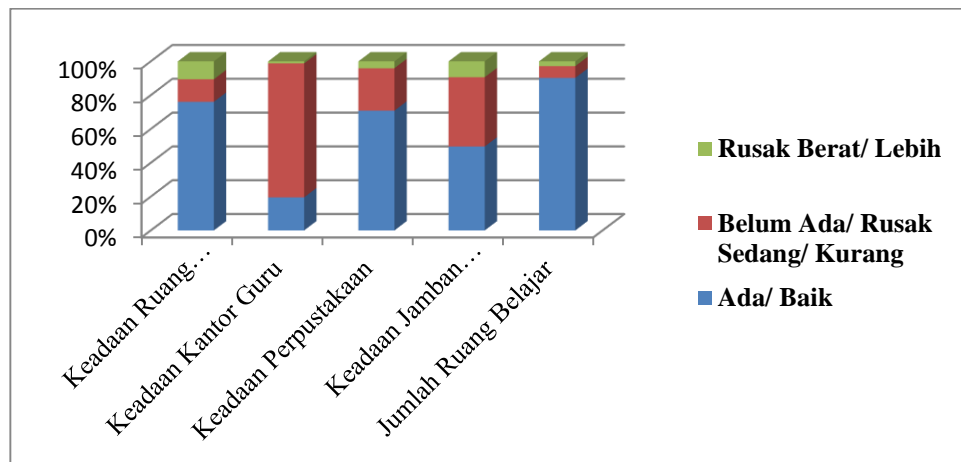
Pemerintah Kabupaten Pringsewu dalam memajukan dunia pendidikan dengan tujuan menciptakan sumber daya manusia berkualitas salah satunya dengan cara menjalankan kebijakan pendidikan. Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu yang berpedoman langsung dengan UUD Sistem Pendidikan Nasional No 20 Tahun 2003. Friedrich (dalam Tresiana, 2017) memandang kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu. Adanya kebijakan yang mengatur tentang pelaksanaan pendidikan di kabupaten Pringsewu dapat mempermudah dalam pengelolaan dan pelaksanaan pendidikan tersebut.

Supriyanto selaku Sekretaris pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu mengatakan bahwa pembangunan sarana dan prasana yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu untuk saat ini

memprioritaskan pada sekolah yang memiliki murid banyak dan bangunannya rusak, untuk saat ini pembangunan lebih difokuskan pada rehab ruang dan sanitasi yang ada di sekolah. Salah satu kendala yang dihadapi saat ini yaitu minimnya anggaran yang diberikan sehingga memperlambat proses pembangunan sarana dan prasarana tersebut.

Saat ini, data rekapitulasi terkait dengan kondisi sarana dan prasaran pendidikan Kabupaten pringsewu cukup buruk. Gambar 2 ini menunjukkan bahwa masih banyak keadaan sarana dan prasarana yang mengalami kerusakan baik itu kerusakan sedang maupun kerusakan berat, dengan jumlah sekolah 269 sekolah yang ada di Kabupaten pringsewu dan jumlah siswa 40.649, peningkatan kualitas sarana dan prasana sangat dibutuhkan. Terdapat 358 ruangan yang memiliki keadaan rusak berat, 828 keadaan ruangan yang masih dibutuhkan oleh dan 266 ruangan yang mengalami kerusakan sedang untuk sekolah dasar (SD). Sarana dan prasarana yang baik dapat mempermudah proses pembelajaran disekolah sehingga bisa menciptakan sumber daya manusia berkualitas dan mewujudkan pendidikan berkualitas pada Kabupaten Pringsewu.

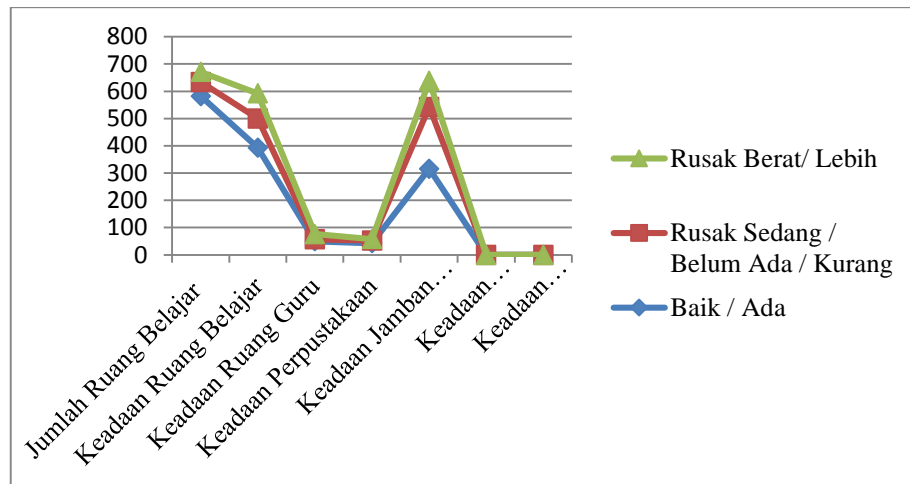
Gambar 1. Rekapitulasi Data Sarana dan Prasarana Sekolah Dasar (SD) Tahun 2018 Kabupten Pringsewu



(Sumber : Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu 2018)

Keadaan sarana dan prasarana pada sekolah menengah pertama (SMP) baik negeri ataupun swasta di Kabupaten Pringsewu tidak jauh beda dengan keadaan sarana dan prasarana pada Sekolah dasar (SD). Terdapat 225 bangunan yang mengalami kerusakan berat secara keseluruhan, sedangkan masih terdapat 124 ruang yang mengalami kerusakan ringan dan 266 ruang yang masih dibutuhkan lagi untuk ruangan laboratorium ilmu pengetahuan alam, laboratorium komputer serta untuk jamban. Masih banyak kondisi sarana dan prasarana yang membutuhkan perhatian khusus terkait dengan kondisi sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Pringsewu, karena jika kita melihat bahwa sarana dan prasarana merupakan salah satu indikator penting dalam meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

Gambar 2. Rekapitulasi Data Sarana dan Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta Tahun 2018 Kabupaten Pringsewu



(Sumber : Dokumen Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu 2018)

Data di atas menunjukkan bahwa masih banyaknya sekolah yang memiliki atau mempunyai bangunan yang kurang layak sedangkan pembangunan sarana dan prasarana tersebut selalu dilakukan dari tahun ke tahun menurut model inkremental kebijakan dimana model tersebut merupakan sebagai variasi dari kebijakan sebelumnya. Lindblom (dalam Anggara, 2014) mengatakan dasar pemikiran inkrementalisme adalah serangkaian kritiknya terhadap model pembuatan keputusan yang rasional. Model ini bersifat konservatif, yaitu pembuat kebijakan menerima keabsahan program-program yang telah mapan dan secara diam-diam menyetujui agar kebijakan sebelumnya tetap dilaksanakan. Model kebijakan sarana dan prasarana tersebut selalu dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu akan tetapi perubahan yang terjadi tidak terlalu mengalami peningkatan dalam pembangunan sarana dan prasarana sekolah, model ini hanya digunakan semacam hal wajib yang harus dilaksanakan setiap tahunnya. Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan

tersebut maka peneliti tertarik untuk meneliti tentang kebijakan pembangunan sarana dan prasarana pada Dinas pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu dalam perspektif model inkremental.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pringsewu ditinjau dari perspektif model inkremental

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitiannya sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis model kebijakan peningkatan mutu pendidikan di Kabupaten Pringsewu dalam perspektif model inkremental.
2. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu dalam peningkatan mutu pendidikan perspektif model inkremental.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memberikan informasi penelitian dan kontribusi terhadap perkembangan keilmuan Ilmu Administrasi Publik, khususnya studi tentang

kebijakan publik sehingga dapat memperkuat teori-teori tentang kebijakan publik dan model kebijakan publik.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat berguna sebagai bahan masukan bagi instansi dan pihak terkait dalam penyempurnaan kebijakan terkait dengan Kebijakan Pembangunan sarana dan prasarana pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu dalam Perspektif model Inkremental.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Pemerintah sebagai penyelenggara negara mempunyai tanggung jawab kepada rakyatnya. Fungsi pemerintah adalah menyelenggarakan negara berdasarkan kewenangannya. Kewenangan yang diberikan kepada pemerintah merupakan dasar bagi pembuatan sampai penetapan kebijakan. Peran pemerintah sangat menentukan dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dalam masyarakat. Permasalahan yang terjadi di masyarakat akan terselesaikan dengan baik melalui kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah sebagai penentu dari penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat dapat dilihat dari hasil kebijakan yang ditetapkannya, perencanaan, penyusunan sampai penetapan kebijakan akan sangat menentukan efektifitas kebijakan itu sendiri. Konsep kebijakan diakui sangat sulit dalam memperlakukan sebuah gejala yang sangat khas dan kongkret, dikarenakan realitanya apa yang disebut kebijakan, seringkali masih berkelanjutan bahkan ketahap dimana kebijakan itu dianggap sudah final. Easton (dalam Tresiana, 2017) mengkonsepsikan kebijakan (*policy*) sebagai serangkaian keputusan dan tindakan untuk mengalokasikan nilai-nilai.

Sedangkan konsep kebijakan publik dimaknai dan dirumuskan secara beragam. Hal itu disebabkan pakar yang mendefinisikan dipengaruhi masalah tertentu yang ingin dikaji, disamping kerangka berfikir (*frame of thinking*) yang dipergunakan berbeda-beda. Berikut ini beberapa pendapat dari pakar yang memperjelas kebijakan publik. United Nation (dalam Tresiana, 2017) menjelaskan kebijakan publik merupakan dasar pedoman bertindak, suatu arah tindakan tertentu, suatu program mengenai aktivitas-aktivitas tertentu atau suatu rencana. Friedrich (dalam Tresiana, 2017) memandang kebijakan publik sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang memberikan hambatan-hambatan dan peluang-peluang terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi dalam rangka mencapai suatu tujuan atau merealisasikan suatu sasaran atau suatu maksud tertentu.

Bridgeman dan Davis (dalam Anggara, 2014) menerangkan bahwa kebijakan publik sedikitnya memiliki tiga dimensi yang saling bertautan, yakni sebagai tujuan (*objective*), sebagai pilihan tindakan yang legal dan sah secara hukum (*authoritative choice*), dan sebagai hipotesis. Menurut Abidin (dalam Anggara, 2014) mengatakan kebijakan publik tidak bersifat spesifik dan sempit, tetapi luas dan berada pada strata strategis. Oleh karena itu, kebijakan publik berfungsi sebagai pedoman umum untuk kebijakan dan keputusan khusus di bawahnya. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah bertujuan mengatur kehidupan bersama untuk mencapai visi dan misi yang telah disepakati. Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat disimpulkan kebijakan publik adalah serangkaian kegiatan, tindakan, atau keputusan yang dilakukan oleh individu, kelompok, atau

pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu yang mempunyai tujuan untuk merealisasikan suatu sasaran yang bersifat luas dan strategis.

2. Proses Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu, banyak para ahli yang mengkaji kebijakan publik dalam membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik ke dalam beberapa tahap. Tujuan ini bermaksud untuk memudahkan dalam mengkaji kebijakan publik. Tahap-tahap kebijakan publik menurut Nugroho (2018) adalah sebagai berikut:

a) Planning

Tahap ketika kebijakan direncanakan untuk dibuat. Pekerjaannya meliputi penyusunan rencana untuk membuat suatu kebijakan dengan cara (1) menemukan isu kebijakan untuk dijadikan agenda kebijakan, membuat perencanaan (2) menyiapkan metode pembuatan kebijakan (3) memilih dan menetapkan tim perumus (4) mempersiapkan segenap kebutuhan untuk pembuatan kebijakan.

b) Formulating

Tahap ketika kebijakan dirumuskan dan ditetapkan. Pekerjaannya adalah memproses pembuatan (perumusan) kebijakan sesuai dengan perencanaan yang sudah dibuat, termasuk didalamnya (1) analisis sensitivitas (2) manajemen resiko, dan (3) strategi pelaksanaan, kepemimpinan, dan pengendalian kebijakan.

c) Implementing

Tahap ketika kebijakan dilaksanakan melalui organisasi yang ada atau yang akan dibuat. Pelaksanaan kebijakan dilakukan dengan cara (1) menyiapkan organisasi pelaksana (2) menyiapkan manusia pelaksana (3) menyiapkan prosedur pelaksanaan kebijakan (*governance, modality*).

d) Leading

Kebijakan publik harus dipimpin. Kebijakan publik adalah urusan pimpinan, bukan urusan staf, sehingga pemimpin harus memimpin sendiri pelaksanaan kebijakan dengan cara (1) menyiapkan tugas pokok bagi setiap pemimpin disetiap jenjang (2) menyiapkan teknik penggerakan (motivasi) untuk melaksanakan kebijakan.

e) Controlling

Kebijakan publik harus dikendalikan agar tidak menjadi liar. Pekerjaan pengendalian kebijakan dilakukan pada saat implementasi atau pelaksanaan kebijakan, selesai pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Kegiatan pekerjaan pengendalian dalam implementasi kebijakan meliputi: (1) pemantauan (2) evaluasi (3) pengendalian.

B. Model Kebijakan

1. Pengertian Model

Model adalah abstraksi dari realita. Penggambaran abstraksi dapat berupa indikator-indikator sari realita. Mustopadidjaja (1992) merumuskan model sebagai penyederhanaan dari kenyataan persoalan yang dihadapi, diwujudkan dalam hubungan-hubungan kausal atau fungsional. Model dapat digambarkan dalam

bentuk skematik model (seperti *flow chart* atau *arrow diagram*), fisik model (seperti miniatur), *game* model (seperti adegan latihan kepemimpinan, latihan manajemen), simbolik model (seperti ekonometrika dan program komputer).

Mustopadidjaja (1992) menjelaskan kebijakan publik juga akan lebih mudah dipelajari dengan bantuan penggunaan model. Model merupakan alat bantu yang baik dalam perumusan dan penentuan solusi atau alternatif yang dipilih dalam pembuatan kebijakan publik. Manfaat penggunaan model adalah mempermudah deskripsi secara struktural, membantu dalam melakukan prediksi akibat-akibat yang timbul daripada ada atau tiadanya perubahan-perubahan dalam faktor penyebab.

2. Model-Model Kebijakan publik

Banyak model yang diajukan oleh para ahli untuk dipergunakan dalam menjelaskan kebijakan publik Dye (dalam Anggara, 2014) menjelaskan bahwa model adalah bentuk abstraksi dari suatu kenyataan. Model merupakan suatu perwakilan yang disederhanakan dari beberapa gejala dunia kenyataan. Berikut ini adalah model kebijakan yaitu :

a. Model *Elite* (kebijakan sebagai preferensi elit)

Anggara (2014) mengatakan istilah *elite* adalah bagian yang terpilih atau tersaring. *elite* dalam kehidupan kelompok adalah bagian yang superior secara sosial dari suatu masyarakat. Adapun dalam kehidupan politik, *elite* adalah kelompok tertentu dari suatu masyarakat yang berkuasa. Anggara (2014) menjelaskan model ini *elite* yang lebih banyak membentuk opini masyarakat

dalam persoalan kebijakan dibandingkan dengan massa membentuk opini *elite*.

Model *elite* secara ringkas dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Masyarakat dibagi menjadi dua yaitu kelompok kecil (golongan elit) yang mempunyai kekuasaan (penguasa) dan kelompok besar (golongan non-elit) yang tidak punya kekuasaan (dikuasai).
2. Kelompok *elite* yang berkuasa berbeda dengan kelompok non-elit yang dikuasai, karena kelompok elit terpilih berdasarkan keistimewaan yang dimiliki.
3. Perpindahan posisi/kedudukan dari non-elit ke elit akan dipersulit.
4. Golongan elit menggunakan consensus.
5. Kebijakan publik tidak menggambarkan kepentingan publik melainkan kepentingan elit.
6. Golongan elit yang aktif relatif sedikit sekali memperoleh pengaruh dari massa yang apatis/pasif. (Anggara, 2014).

b. Model Kelompok (kebijakan sebagai keseimbangan kelompok)

Model ini berangkat dari dalil bahwa interaksi antara kelompok-kelompok merupakan titik pusat kenyataan politik. Kelompok dipandang sebagai jembatan antara individu dan pemerintah. Anggara (2014) mengatakan Individu-individu yang memiliki kepentingan yang sama mengikatkan baik secara formal maupun informal kedalam kelompok kepentingan (*interest group*) yang dapat mengajukan dan memaksakan kepentingan-kepentingannya kepada pemerintah. Interaksi antar kelompok dalam masyarakat merupakan fakta sentral dari politik dan *public policy*. Kelompok merupakan jembatan esensial yang menghubungkan antara

individu dan pemerintahnya. Tugas sistem politik adalah mengatur konflik antar kelompok dengan cara :

1. Membuat aturan permainan dalam percaturan antar kelompok.
 2. Mengatur kompromi dan menciptakan keseimbangan kepentingan-kepentingan yang berbeda.
 3. Mewujudkan kompromi-kompromi tersebut dalam bentuk kebijaksanaan Negara,dan, ‘
 4. Melaksanakan (Anggara 2014).
- c. Model Rasionalisme (kebijakan sebagai pencapaian keuntungan sosial secara maksimal)

Anggara (2014) menjelaskan bahwa faham rasional menyatakan kebijakan merupakan suatu pencapaian sasaran secara efisien. Model rasional adalah model dimana prosedur pembuatan keputusan yang akan membimbing pada pilihan alternatif dicari yang paling efisien dari pencapaian tujuan kebijakan. Kebijakan yang rasional adalah dirancang secara tepat untuk memaksimalkan hasil nilai bersih (*net value achievement*). Adapun syarat yang harus dipenuhi untuk memilih kebijakan yang rasional yaitu :

1. Mengetahui keinginan atau kebutuhan masyarakat (preferensi nilai),
2. Mengetahui seluruh alternatif kebijakan yang mendukung pencapaian manfaat kebijakan,
3. Mengetahui seluruh konsekuensi kebijakan,
4. Memperhitungkan rasio antara manfaat dan biaya yang dipikul dari setiap alternatif,
5. Memilih alternatif kebijakan yang paling efisien.

- d. Model Teori Permainan (*Game Theory*, kebijakan sebagai pilihan rasional dalam situasi kompetitif)

Anggara (2014) menjelaskan teori permainan merupakan varian dari model rasional dan merupakan studi mengenai pembuatan keputusan rasional dalam suatu keadaan ketika terjadi dua atau lebih partisipan yang mempunyai pilihan atas kebijakan dan hasilnya bergantung pada pilihan masing-masing. Istilah *game* mengandung arti pembuat kebijakan harus memutuskan sesuatu yang hasilnya bergantung pada pilihan aktor yang terlibat. Anggara (2014) menjelaskan teori ini merupakan bentuk dari rasionalisme yang diterapkan dalam situasi kompetitif, yaitu keberhasilannya bergantung pada hal-hal yang akan dikerjakan oleh partisipan. Oleh karena itu, *pay off* (hasil yang menguntungkan) bukan hasil pertimbangan seseorang aktor, melainkan aktor lawannya.

- e. Model Institusional atau kelembagaan (kebijakan sebagai hasil dari lembaga)

Anggara (2014) menjelaskan model ini merupakan model tradisional dalam proses pembuatan kebijakan dimana fokus model ini terletak pada struktur organisasi pemerintah. Kegiatan-kegiatan politik berpusat pada lembaga-lembaga pemerintah yaitu lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif pada pemerintah pusat (nasional), regional, dan lokal. Ketiga lembaga pemerintah ini merupakan aktor internal birokrasi pembuatan kebijakan. Sedangkan aktor eksternal birokrasi dalam pembuatan kebijakan publik hanya berfungsi memberikan pengaruh dalam batas kewenagannya masing-masing. Lembaga pemerintah memberikan *public policy* tiga karakteristiknya, antara lain:

1. Pemerintah meminjamkan legitimasi pada kebijakan (*policy*).
2. Sifat universalitas dari kebijakan publik.
3. Pemerintah memonopoli paksaan dalam masyarakat. (Anggara, 2014)

f. Model Proses (kebijakan sebagai aktivitas politik)

Anggara (2014) menjelaskan model proses menggunakan pendekatan politik modern (*behavioral*) sebagai dasar analisis kebijakan publik. Pendekatan ini berpusat pada tingkah laku individu atau aktor politik. Salah satu tujuan utamanya adalah untuk mencari pola-pola tingkah laku (proses) yang dapat diidentifikasi. Model proses berguna dalam membantu memahami aneka macam kegiatan yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan. Adapun proses kebijakan terdiri atas berikut ini:

- 1) Identifikasi masalah
- 2) Agenda setting
- 3) Perumusan isu kebijakan
- 4) Pengesahan kebijakan
- 5) Pelaksanaan kebijakan
- 6) Evaluasi kebijakan

Model proses hanya menekankan tahapan aktivitas yang dilakukan dalam menghasilkan kebijakan publik. Oleh karena itu, model ini memiliki kelemahan, yaitu kurang memperhatikan isi substansi dari kebijakan yang akan dibuat (Anggara, 2014)

g. Teori pilihan publik (kebijakan sebagai pengambilan keputusan kolektif oleh kepentingan diri individu)

Buchanan (dalam Anggara 2014) mengatakan individu datang bersama-sama dalam politik untuk kepentingan bersama. Akan tetapi, dengan motivasi diri pribadi dapat saling menguntungkan melalui pengambilan keputusan. Teori pilihan publik mengakui bahwa pemerintah harus menjalankan fungsi tertentu ketika pasar tidak mampu mengatasinya, yaitu kegagalan pasar dimana pemerintah harus menyediakan barang publik. Anggara (2014) mengatakan implementasi kebijakan disadari atau tidak sering menjadi masalah, kritik yang sering muncul terhadap pemerintah selaku *policy maker* (pengambil keputusan) dan unsur pemerintah lainnya sebagai pelaksana atau pengawasan/pengendali kebijakan adalah ketidak-konsistenan dalam penerapannya. Ketidakkonsistenan ini dapat muncul dengan berbagai macam indikasi, antara lain ketidaktegasan dalam penerapan, menyalahgunakan kebijakan dengan persepsi sendiri (untuk hal yang sudah jelas), perlakuan yang pilih kasih (tebang pilih), bahkan merancukan kebijakan. Hal-hal inilah yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpercayaan publik terhadap pemerintah sebagai pelaku kebijakan.

h. Model pengamatan terpadu (*mixed scanning*)

Limitasi model rasional dan incremental membawa para ahli pembuat kebijakan publik mencari alternatif-alternatif baru. Amitai Etzioni (dalam Apriyanti, 2008) mengembangkan pemindaian gabungan-model *mixed scanning* untuk menjembatani berbagai kekurangan, baik model rasional maupun inkremental, dengan mengkombinasikan elemen-elemen antara keduanya. Model gabungan seperti ini memberikan ruang yang lebih luas untuk inovasi daripada model

inkremental, tanpa terlalu dibebani dengan tuntutan-tuntutan yang tidak realistis dari model rasional. Etzioni (dalam Apriyanti, 2008) mengatakan lebih lanjut bahwa pengambilan keputusan seperti inilah yang lebih sering terjadi dalam realitas pengambilan keputusan kebijakan publik.

3. Model Kebijakan Inkremental

Anggara (2014) mendeskripsikan model inkremental ini dengan memandang kebijakan publik sebagai kelanjutan aktivitas pemerintah yang lalu, dengan modifikasi-modifikasi kebijakan yang bersifat tambal sulam. Model inkremental menggambarkan pembuatan keputusan kebijakan publik adalah sebagai suatu proses politis yang ditandai dengan tawar menawar dan kompromi untuk kepentingan para pembuat keputusan yang akhirnya dibuat lebih mencerminkan pada apa yang tampak secara politis dari pada yang diinginkan.

Anggara (2014) mengatakan ahli ilmu politik Lindblom yang pertama kali mengemukakan model inkremental dalam serangkaian kritiknya terhadap model pembuatan keputusan yang rasional. Pandangan Lindblom menjelaskan bahwa para pembuat keputusan mengembangkan kebijakan melalui suatu proses pembuatan membandingkan keberhasilan secara terbatas dari keputusan yang lalu. Dasar pemikiran inkrementalisme adalah bersifat konservatif, yaitu pembuat kebijakan menerima keabsahan program-program yang telah mapan dan secara diam-diam menyetujui agar kebijakan sebelumnya tetap dilaksanakan. Perhatian terhadap program baru dipusatkan untuk menambah, mengurangi, dan menyempurnakan program-program yang telah ada. Terdapat beberapa alasan pembuat kebijakan lebih bersifat inkremental, antara lain :

1. Keterbatasan waktu, informasi, ataupun biaya untuk meneliti atas kebijakan yang sedang berjalan atau meneliti dari semua kemungkinan alternatif dari suatu kebijakan yang ada.
2. Menerima keabsahan dari kebijakan sebelumnya karena ketidaktentuan akibat-akibat yang ditimbulkan dari kebijakan yang baru.
3. Mungkin terdapat investasi dalam program yang ada sehingga dapat mengurangi perubahan radikal.
4. Secara politis, *inkrementalisme* adalah cara yang bijaksana. Penting untuk menurunkan ketegangan konflik, memelihara kestabilan, dan melindungi sistem politik (Anggara , 2014).

Anggara (2014) mengatakan bahwa *Inkrementalisme* adalah satu model yang didukung oleh sifat manusia yang cenderung mempertahankan stabilitas, kurang menyukai konflik, dan tidak mau bersusah payah mencari hal yang paling baik di antara yang baik. Mengembangkan model inkremental dalam kebijakan publik paling layak diatributkan pada ilmuwan politik Lindblom (dalam Apriyanti, 2008) yang merangkum model ini sebagai sebuah model yang terdiri dari strategi-strategi yang saling mendukung dalam melakukan penyederhanaan dan pemusatan fokus. Strategi-strategi itu adalah:

1. Pembatasan analisis hanya pada beberapa alternative kebijakan yang familiar;
2. Sebuah analisis tujuan kebijakan yang saling berkaitan dan nilai-nilai dengan berbagai aspek empiris dari masalah yang dihadapi;
3. Sebuah strategi yang mengedapankan analisis untuk mencari masalah yang ingin diselesaikan dari pada tujuan-tujuan positif yang ingin dikejar;

4. Serangkaian percobaan, kegagalan, dan percobaan ulang;
5. Analisis yang mengeksplorasi hanya sebagian, bukan keseluruhan, konsekuensi-konsekuensi yang penting dari suatu alternatif yang dipertimbangkan;
6. Setiap partisipan mengerjakan bagian mereka dari keseluruhan domain (Apriyanti, 2008).

Pandangan Lindholm (dalam Apriyanti, 2008) mengatakan para pengambil keputusan mengembangkan berbagai kebijakan melalui sebuah proses membuat perbandingan terbatas yang berurutan dengan kebijakan sebelumnya, yaitu keputusan-keputusan yang sudah familiar bagi mereka. Ramahdani & Ramadhani (2017) mengatakan dalam artikel *the science of mudding through* bahwa para pembuat keputusan bekerja melalui suatu proses secara terus menerus dari situasi saat ini, langkah demi langkah, dan dengan tingkat yang kecil membuat keputusan yang berbeda secara marginal dari yang sudah ada; dengan kata lain, perubahan sesedikit mungkin dari *status quo* adalah *incremental*.

Ramahdani & Ramadhani (2017) mengatakan model inkremental memandang bahwa pembuatan keputusan bagi pemecahan masalah untuk mencapai tujuan, dipilih melalui *trial and error* dari pada melalui evaluasi menyeluruh. Para pembuat keputusan hanya mempertimbangkan alternatif yang akan dipatuhi kelompok sasaran dan menghentikan pencarian alternatif lain ketika mereka mempercayai suatu alternatif yang dapat diterima sudah didapatkan. Namun demikian pembuatan keputusan inkremental merupakan usaha-usaha untuk mencapai keputusan yang lebih rasional. Kelemahan model inkremental adalah hanya dapat diambil ketika masalah yang dihadapi pembuat kebijakan publik

merupakan masalah rutin dan tidak dapat dilaksanakan untuk mengatasi masalah krisis.

C. Pendidikan

1. Konsep Pendidikan

Sholichah (2018) mengatakan manusia tidak bisa lepas dari pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sektor penting dalam pembangunan di setiap negara. Menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas dalam pasal 1 disebutkan bahwa pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, mengembangkan segala potensi yang dimiliki peserta didik melalui proses pembelajaran. Pasal 4 dijelaskan bahwa peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.

Sholichah (2018) menjelaskan pendidikan secara etimologi berasal dari kata *paedagogiek* dari bahasa Yunani, terdiri dari kata *pais* artinya anak dan *again* artinya membimbing, jadi jika diartikan, *paedagogiek* artinya bimbingan yang diberikan kepada anak. Pendidikan dalam bahasa Romawi berasal dari kata *educate* yang berarti mengeluarkan sesuatu yang berada dari dalam, sedangkan dalam bahasa Inggris pendidikan diistilahkan dengan kata *to educate* yang berarti memperbaiki moral dan melatih intelektual. Secara bahasa definisi pendidikan

mengandung arti bimbingan yang dilakukan oleh seseorang (orang dewasa) kepada anak-anak, untuk memberikan pengajaran, perbaikan moral dan melatih intelektual. Bimbingan kepada anak-anak dapat dilakukan tidak hanya dalam pendidikan formal yang diselenggarakan pemerintah, akan tetapi peran keluarga dan masyarakat dapat menjadi lembaga pembimbing yang mampu menumbuhkan pemahaman dan pengetahuan.

Berperannya keluarga dan masyarakat dalam melakukan bimbingan pengetahuan, sejalan dengan definisi pendidikan menurut Dalle (dalam Sholichah, 2018) yang menjelaskan bahwa pendidikan sebagai usaha sadar yang dilakukan oleh keluarga, masyarakat, dan pemerintah melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan latihan yang berlangsung di sekolah dan di luar sekolah sepanjang hayat untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat memainkan peranan dalam berbagai lingkungan hidup secara tetap untuk masa yang akan datang. Hal senada juga dijelaskan oleh Abdullah (dalam Sholichah, 2018) yang menjelaskan pendidikan sebagai proses yang dibangun masyarakat untuk membawa generasi-generasi baru kearah kemajuan dengan cara-cara tertentu sesuai dengan kemampuan yang berguna untuk mencapai tingkat kemajuan paling tinggi.

Selain pandangan mengenai pendidikan yang disampaikan di atas, berikut ini akan dikemukakan berbagai hakikat pendidikan yang disampaikan para tokoh pendidikan, hal ini bertujuan untuk memberikan pemahaman dan kesadaran arti pentingnya pendidikan bagi setiap individu, baik pendidikan formal, non formal dan informal. Sedangkan menurut Marimba (dalam Hasbullah, 2008) pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh pendidik terhadap

perkembangan jasmani dan rohani terdidik menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Unsur-unsur yang terdapat dalam hal ini adalah: (1) Usaha (kegiatan), usaha itu bersifat bimbingan (pimpinan atau pertolongan) dan dilakukan secara sadar, (2) ada pendidik, pembimbing, atau penolong, (3) ada yang di didik atau si terdidik, (4) bimbingan itu mempunyai dasar dan tujuan.

Ki Hajar Dewantara (dalam Hasbullah, 2008) mendefinisikan pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai kemaslahatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Makna yang lebih luas, ungkapan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan juga dapat didefinisikan sebagai penuntun, pembimbing, dan petunjuk arah bagi para peserta didik agar mereka dapat tumbuh menjadi dewasa sesuai dengan potensi dan konsep diri yang tertanam dalam diri sebenarnya.

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat disimpulkan pendidikan adalah usaha sadar yang dilakukan oleh seseorang melalui kegiatan pembelajaran, pembimbingan dan pengajaran yang berlangsung secara formal maupun non formal dengan tujuan membentuk kepribadian yang baik dan bermartabat sebagai anggota masyarakat dan sebagai petunjuk arah dalam menjalankan kehidupan pada masa yang akan datang.

2. Fungsi Pendidikan

Undang-undang Sisdiknas No. 20 tahun 2003 Bab II Pasal 3 dikatakan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan

kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Sholichah (2018) mengatakan pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Pendapat di atas dapat dikemukakan bahwa fungsi pendidikan itu merupakan suatu proses yang sangat penting dan tidak bisa lepas dari kehidupan manusia. Pendidikan itu harus berjalan untuk menjaga keberlangsungan hidup manusia, karena tanpa pendidikan tidak akan ada transformasi pengetahuan serta nilai-nilai dan norma sosial dari generasi tua kegenerasi muda.

3. Standar Mutu Pendidikan

Hidayati (2014) mengatakan mutu pendidikan nasional akan terukur lewat ketercapaian segenap standar pendidikan nasional, meliputi standar isi, proses, kompetensi kelulusan, pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan, pembiayaan dan penilaian pendidikan. Perhatian yang serius dan sungguh-sungguh oleh para pihak terhadap upaya pemenuhan dan perwujudan segenap standar tersebut akan menentukan kualitas/mutu pendidikan. Persoalan mutu pendidikan merupakan isu yang selalu hangat dan menarik untuk diperbincangkan dan dikaji.

Idris dan Lestari (2017) mengatakan mutu pendidikan bersifat relatif karena tidak semua orang memiliki ukuran yang sama persis. Namun demikian apabila mengacu pada pengertian mutu secara umum dapat dinyatakan bahwa pendidikan yang bermutu adalah pendidikan yang seluruh komponennya memiliki persyaratan dan ketentuan yang diinginkan pelanggan dan menimbulkan kepuasan. Mutu pendidikan adalah baik, jika pendidikan tersebut dapat menyajikan jasa yang sesuai dengan kebutuhan para pelanggannya. Definisi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa mutu adalah keadaan yang sesuai dan melebihi harapan pelanggan hingga pelanggan memperoleh kepuasan. Standar mutu pendidikan dapat dirujuk dari standar nasional pendidikan yang telah ditetapkan kriteria minimal tentang sistem pendidikan di Indonesia menurut Idris dan Lestari (2017) meliputi:

1. Standar kompetensi lulusan yaitu standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, keterampilan dan sikap yang wajib dimiliki peserta didik untuk dapat dinyatakan lulus
2. Standar isi adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan cakupan ke dalam materi pelajaran untuk mencapai standar kompetensi lulusan yang dituangkan ke dalam kompetensi bahan kajian, kompetensi mata pelajaran, dan silabus pembelajaran.
3. Standar proses adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan prosedur dan pengorganisasian pengalaman belajar untuk mencapai standar kompetensi lulusan.

4. Standar pendidik dan tenaga kependidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan kualifikasi minimal yang harus dipenuhi oleh setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
5. Standar sarana dan prasarana adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan prasyarat minimal tentang fasilitas fisik yang diperlukan untuk mencapai standar kompetensi lulusan.
6. Standar pengelolaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pelaporan, dan pengawasan kegiatan agar tercapai efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pendidikan.
7. Standar pembiayaan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan biaya untuk penyelenggaraan satuan pendidikan.
8. Standar penilaian pendidikan adalah standar nasional pendidikan yang berkaitan dengan mekanisme, prosedur, dan alat penilaian pendidikan.

Berdasarkan beberapa pernyataan di atas, maka mutu pendidikan di sekolah dapat diartikan sebagai kemampuan sekolah dalam pengelolaan secara operasional dan efisien terhadap komponen-komponen yang berkaitan dengan sekolah, sehingga menghasilkan nilai tambah terhadap komponen tersebut menurut norma atau standar yang berlaku (Idris dan Lestari, 2017).

III METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Metode Penelitian

Sugiyono (2017) mengatakan tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif akan terjadi tiga kemungkinan terhadap masalah yang dibawa oleh peneliti dalam penelitian. Penelitian ini mendeskripsikan dan menjelaskan tentang. Peneliti menggunakan tipe penelitian kualitatif ini karena sesuai dengan kebutuhan peneliti dalam memperoleh pemahaman menyeluruh dan mendalam mengenai model kebijakan Inkremental dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas (studi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu) dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Charles E. Lindblom.

B. Fokus Penelitian

Sugiyono (2017) mengatakan dalam mempertajam penelitian kualitatif peneliti menetapkan fokus. Spradley dalam Sugiyono (2017) menyatakan bahwa *a focused refer to a single cultural domain or a few related domains*, maksudnya adalah bahwa fokus itu merupakan domain tunggal atau beberapa domain yang terkait dari situasi sosial. Untuk dapat memahami secara lebih luas dan mendalam, maka diperlukan pemilihan fokus penelitian. Adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan fokus adalah kebijakan pembangunan sarana dan prasarana pada

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu dalam perspektif model inkremental dengan menggunakan teori yang dikembangkan oleh Charles E. Lindblom (Apriyanti, 2008) :

1. Kebijakan Pendidikan

Kebijakan ini menunjuk kepada pelaksanaan kebijakan pendidikan yang dijalankan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan mengacu pada UU No 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional dan disesuaikan dengan visi misi Pemerintah Kabupaten Pringsewu pada tahun 2017-2022.

2. Meningkatkan Sarana dan Prasarana Pendidikan

Peningkatan sarana dan prasarana pendidikan bertujuan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pringsewu dan menciptakan pendidikan yang berkualitas sesuai dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan visi misi Kabupaten Pringsewu.

3. Ketercapaian hasil pelaksanaan

Ketercapaian hasil pelaksanaan kebijakan khususnya dalam kebijakan sarana dan prasarana pendidikan Pemerintah Kabupaten Pringsewu selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas sarana dan prasarna pendidikan yang ada melalui kebijakan sarana dan prasarana tersebut. Hal ini juga ditunjukkan kepada sekolah SD maupun SMP yang ada di Kabupaten Pringsewu dalam melakukan proses penginputan data kondisi sarana dan prasarana sekolah yang dilakukan enam bulan sekali untuk mendapatkan biaya pembangunan/perbaikan sekolah. Partisipasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu dalam mengontrol secara langsung kepada sekolah supaya data yang diinput

tersebut benar-benar valid dan tidak ada kesalahpahaman sehingga sekolah yang menerima pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana tersebut bisa digunakan sesuai dengan kebutuhannya.

4. Memanfaatkan peluang dan menghadapi tantangan pendidikan

Dalam pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Pringsewu saat ini pemerintah sedang berupaya untuk memanfaatkan peluang-peluang pendidikan serta menghadapi tantangan-tantangan pendidikan yang ada. Dengan memanfaatkan peluang pendidikan dan menghadapi tantangan tersebut pemerintah Kabupaten Pringsewu berharap dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dipilih peneliti sebagai lokasi penelitian adalah di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu karena Kabupaten Pringsewu merupakan salah satu Kabupaten yang mempunyai jumlah penduduk banyak yang ada di Lampung dan salah satu kabupaten yang tidak mempunyai sumber daya alam yang bisa dimanfaatkan. Oleh sebab itu, pemerintah Kabupaten Pringsewu ingin memfokuskan pemberdayaan sumber daya manusia yang dilakukan melalui proses pendidikan dengan tujuan dapat menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Peneliti juga melakukan penelitian pada SMP N 3 Pagelaran, SMP N 2 Pardasuka, SD N 1 Panggung Rejo, SD N 3 Pujodadi, dan SD N 10 Bandung Baru.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Sugiyono (2017) mendefinisikan data adalah bentuk jamak *datum*. Data merupakan keterangan–keterangan tentang suatu hal, dapat berupa sesuatu yang diketahui atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut, maka peneliti membagi data dalam penelitian ini ke dalam 2 (dua) jenis yaitu:

- a) Data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data berkaitan dengan fokus penelitian dan merupakan hasil pengumpulan peneliti sendiri selama berada dilokasi penelitian (Sugiyono, 2017). Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kegiatan atau kejadian, dan hasil pengujian. Data-data tersebut merupakan bahan analisis utama yang digunakan dalam penelitian ini yang berupa hasil wawancara dan observasi atau pengamatan pada pihak-pihak terkait atau informan dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu dan sekolah yang menerima pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana di Kabupaten Pringsewu.

- b) Data sekunder merupakan bahan data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen (Sugiyono, 2017). Data sekunder dalam penelitian ini yaitu berupa buku-buku tentang pelaksanaan mutu pendidikan dan Rapot Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupten Pringsewu, jurnal dan skripsi tentang kebijakan publik dan mutu pendidikan, dokumen renstra Kabupaten Pringsewu Disdik 2017-2022, serta dokumentasi gambar atau foto pendukung terkait dengan hasil

pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana di sekolah sebagai salah satu mutu pendidikan di Kabupaten Pringsewu untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas.

2. Sumber Data

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah :

a) Informan

Sumber data primer diperoleh dengan cara menggali informasi langsung melalui wawancara kepada orang atau informan penelitian yang berkaitan langsung dengan model kebijakan inkremental untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas di Kabupaten Pringsewu. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu Sekretaris dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Subbag Perencanaan, Kasi sarana dan prasarana bidang pendidikan dasar, Kepala bidang guru dan tenaga kependidikan sebagai orang yang khusus melayani masyarakat dalam upaya meningkatkan pendidikan yang berkualitas.

b) Objek

Objek dalam penelitian ini yaitu diantaranya orang atau informan yang berkaitan langsung dengan pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Pringsewu dan beberapa kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bagian sarana dan prasarana serta hal-hal yang diamati oleh peneliti terkait pelaksanaan pembangunan/ perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

c) Dokumen

Dokumen digunakan untuk menghimpun berbagai data sekunder yang memuat informasi tertentu yang bersumber dari dokumen-dokumen tertulis berupa perundang-undangan, surat keputusan, arsip-arsip, foto-foto dan sebagainya yang mendukung data penelitian terkait Model Kebijakan Inkremental untuk mewujudkan Pendidikan yang berkualitas pada Dinas Pendidikan dan kebudayaan Kabupaten Pringsewu tahun 2018. Adapun dokumen-dokumen yang digunakan sebagai pendukung dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 2. Daftar Dokumen Penelitian

NO	Dokumen
1.	UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2.	Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022.
3.	Permendikbud No 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengacu pada sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan.
4.	Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022.
5.	Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah.
6.	Rapot Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2018.
7.	Juknis SPMI 2018 Pendidikan Dasar.
8.	Panduan Simdak Dikdasmen bidan Pendidikan Dasar 2017.
9.	Daftar nama Sekolah Dasar yang menerima pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana 2018.
10.	Stuktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.
11.	Foto Sekolah yang mengalami kerusakan sarana dan prasarana.
12.	Foto Sekolah yang sudah menerima pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana tahun 2018.
13.	Foto sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak sekolah.

(Sumber: diolah oleh Peneliti, 2019)

E. Instrumen Penelitian

1. Peneliti

Sugiyono (2017) menjelaskan bahwa dalam penelitian kualitatif yang menjadi instrumen penelitian atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri. Oleh karena itu peneliti sebagai instrumen juga harus divalidasi seberapa jauh peneliti kualitatif siap melakukan penelitian yang selanjutnya terjun ke lapangan. Peneliti kualitatif sebagai *human instrument*, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya.

Menurut Nasution (dalam Sugiyono, 2017) menjelaskan penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Peneliti akan terjun ke lapangan sendiri, baik pada *grand tour question*, tahap *focused and selection*, melakukan pengumpulan data, analisis dan membuat kesimpulan. Instrumen yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah observasi, pedoman wawancara, dan dokumentasi.

2. Perlengkapan Penelitian

Instrumen penelitian lainnya selain peneliti sendiri yaitu perlengkapan penelitian yang digunakan. Adapun perlengkapan penelitian yang digunakan oleh peneliti yaitu kamera untuk mengambil atau mendokumentasikan foto-foto yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan di Kabupaten Pringsewu, alat tulis berupa buku catatan dan pena yang digunakan untuk mencatat hal-hal penting selama

pengamatan di lapangan maupun pada saat kegiatan wawancara. dan alat perekam (*recorder*) untuk merekam suara selama kegiatan wawancara berlangsung.

F. Teknik Pengumpulan Data

Sugiyono (2015) menjelaskan teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tahap ini terdapat tiga macam metode yang digunakan dalam mengumpulkan data, yaitu:

1. Observasi

Nasution (dalam Sugiyono, 2017) menyatakan bahwa observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan. Observasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap objek penelitian.

Dalam penelitian ini, kegiatan observasi oleh peneliti dilakukan selama kurang lebih satu bulan yang terhitung mulai dari akhir bulan februari sampai dengan pertengahan bulan maret tahun 2019. Adapun kegiatan observasi yang telah dilakukan oleh peneliti yaitu melakukan pengamatan langsung terhadap beberapa pihak pelaksana program, mengamati infrastruktur pendukung pelaksanaan program pada sekolah yang menerima pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana sekolah oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

2. Wawancara (*interview*)

Sugiyono (2017) mengatakan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti. Wawancara dilakukan

untuk mengumpulkan data dengan jalan mewawancarai sumber-sumber data yaitu informan penelitian dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan kebijakan pendidikan di Kabupaten Pringsewu untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Adapun informan dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 3. Daftar Informan Penelitian

No	Nama	Jabatan	Informasi yang didapatkan
	Rustiyan, M.Pd	Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu	Serangkaian percobaan, kegagalan dan percobaan ulang pelaksanaan kebijakan pendidikan di Kabupaten Pringsewu.
2.	Eko Subagio S.Pd	Sub Bagian Perencanaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu	Pembuatan Renstra terkait dengan kebijakan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun
3.	Eko Kusmiran, S.Pd	Kabid guru dan Kependidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu	Tujuan pelaksanaan Kebijakan mutu pendidikan di Kabupaten Pringsewu.
4.	Haiyin, M.M	Kasi Sarana dan Prasarana Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu	Partisipasi terkait kondisi sarana dan prasarana sekolah di kabupaten Pringsewu
5.	Sakijo, S.Pd, M.M	Kepala Sekolah SMP N 3 Pagelaran	Pelaksanaan pembangunan Ruang Kelas Baru dan standar mutu pendidikan.
6.	Agus Dwinanto, S.Pd	Waka Saspras SMP N 2 Pardasuka	Pelaksanaan Rehab Ruang Kelas dan Kondisi sarana dan Prasarana sekolah yang kurang layak dan standar mutu pendidikan.
7.	Salamun, S.Pd	Kepala Sekolah SD N 1 Panggung Rejo	Standar Mutu Pendidikan

8.	Wagiman, S.Pd	Kepala Sekolah SD N 3 Pujodadi	Sarana dan prasarana yang masih kurang lengkap
9.	Abidin, S.Pd.SD	Kepala Sekolah SD N 10 Bandung Baru	Pelaksanaan pembangunan Rehab Ruang Kelas

(Sumber: diolah oleh Peneliti, 2019)

3. Dokumentasi

Sugiyono (2017) mengatakan dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi dibutuhkan dalam penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa buku, arsip, jurnal, skripsi, foto atau gambar dan sebagainya yang mendukung penelitian. Berikut ini dokumentasi dalam penelitian ini yaitu :

Tabel 4. Dokumentasi Penelitian

NO	Dokumen
1.	UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2.	Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022.
3.	Permendikbud No 21 Tahun 2016 Tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengacu pada sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan ketrampilan.
4.	Renstra Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2017-2022.
5.	Pelaksanaan Penjaminan Mutu Pendidikan Oleh Pemerintah Daerah.
6.	Rapot Pendidikan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu Tahun 2018.
7.	Juknis SPMI 2018 Pendidikan Dasar.
8.	Panduan Simdak Dikdasmen bidan Pendidikan Dasar 2017.
9.	Daftar nama Sekolah Dasar yang menerima pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana 2018.
10.	Stuktur Organisasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu.

11.	Foto Sekolah yang mengalami kerusakan sarana dan prasarana.
12.	Foto Sekolah yang sudah menerima pembangunan/perbaikan sarana dan prasarana tahun 2018.
13.	Foto sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh pihak sekolah.

(Sumber: diolah oleh Peneliti, 2019)

G. Teknik Analisis Data

Bogdan (dalam Sugiyono, 2017) menjelaskan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan mengorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang diceritakan kepada orang lain. Adapun beberapa kegiatan yang dilakukan dalam menganalisis data kualitatif yaitu :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Sugiyono (2017) menjelaskan reduksi data diartikan proses pemilihan, *focusing*, penyederhanaan, abstraksi dan transformasi data mentah yang ada dalam semua bentuk catatan dan dokumen lapangan. Reduksi data ini dilakukan pada saat memilah informasi data yang diperoleh pada saat wawancara kepada informan.

Misalkan terkait dengan pertanyaan bagaimana komunikasi yang terjalin antar pelaksana kebijakan pendidikan untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas dengan menggunakan model inkremental pada Dinas pendidikan

dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu, jawaban informan yaitu sebulan sekali kita selalu adakan rapat rutin yang terencana atau tidak terencana (bersifat insidental). Berdasarkan hasil wawancara yang telah diperoleh tersebut maka peneliti akan memfokuskan data yang benar-benar berhubungan dengan permasalahan yang kemudian akan ditampilkan pada sub-bab hasil penelitian.

2. Penyajian Data (*Data display*)

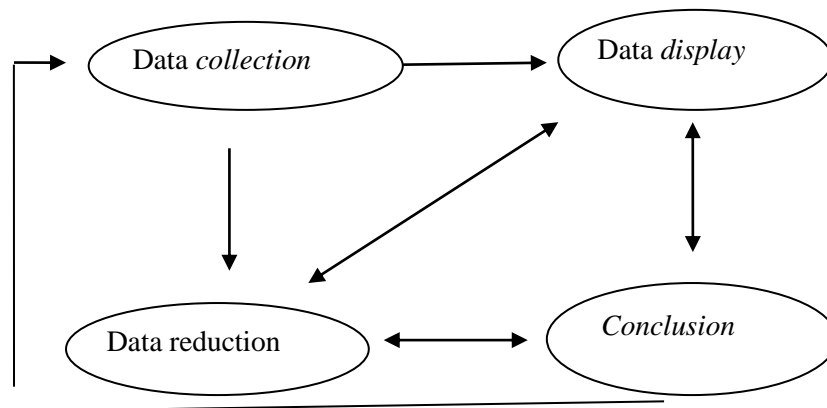
Sugiyono (2017) mendeskripsikan penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang berguna untuk memudahkan peneliti memahami gambaran secara keseluruhan atau bagian tertentu dari penelitian. Penyajian data dalam penelitian ini adalah dengan teks naratif yaitu penyajian data yang dilakukan dengan cara mendeskripsikan atau memaparkan hasil temuan dalam wawancara terhadap informan dan juga penyajian data dalam bentuk tabel serta gambar yang mendukung penelitian.

3. Penarikan Kesimpulan (*Conclusion*)

Sugiyono (2017) mengatakan penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan secara terus menerus selama penelitian berlangsung. Berdasarkan keseluruhan data yang diperoleh maka kemudian dikategorikan, dicari tema dan polanya kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dan mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data maka kesimpulan yang dikemukakan

merupakan kesimpulan yang akurat. Berikut ini bagan teknik analisis berdasarkan model komponen analisis data :

Gambar 3. Komponen Dalam Analisis Data



(Sumber : Sugiyono, 2017)

H. Teknik Keabsahan Data

Sugiyono (2017) mengatakan keabsahan data dalam suatu penelitian sering hanya ditekankan pada uji validitas dan reliabilitas. Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan data yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Penentuan keabsahan data dalam penelitian kualitatif harus memenuhi beberapa persyaratan menurut Sugiyono (2017), yaitu dengan menggunakan kriteria:

1. Derajat Kepercayaan (*Credibility*)

a) Triangulasi


Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu.


Terdapat tiga macam triangulasi yaitu: 1) triangulasi sumber digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data yang

diperoleh melalui beberapa sumber, 2) triangulasi teknik digunakan untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, 3) triangulasi waktu merupakan triangulasi yang sering mempengaruhi kredibilitas data.

Penelitian ini, peneliti melakukan pengecekan melalui derajat kepercayaan dengan menggunakan cara triangulasi sumber yaitu membandingkan hasil data yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi terhadap sumber yang berbeda. Data dari beberapa sumber tersebut kemudian dikategorisasikan mana pandangan yang sama, mana yang berbeda dan mana yang spesifik.

Tabel 5. Contoh Tabel Tringulasi

Topik	Wawancara	Observasi	Dokumentasi	Kesimpulan
<p>Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan.</p>	<p>Melengkapi sarana dan prasarana pendidikan dasar pemerintah Kabupaten Pringsewu sedang berusaha untuk melengkapinya sesuai apa dengan yang dibutuhkan dalam proses pembelajaran. Pengadaan sarana dan prasarana bagi sekolah disesuaikan dengan data yang diupload melalui aplikasi Dapodik dimana data sarana dan prasarana pendidikan tersebut selalu diperharui oleh pihak sekolah terkait fasilitas yang dibutuhkan dan yang memerlukan perbaikan.</p> <p>(Bapak Haiyin, Kasi sarana dan prasarana bidan pendidikan dasar Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu).</p>	<p>Dokumen daftar nama sekolah yang menerima peningkatan sarana dan prasarana oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu 2018.</p> <p>Dokumen Juknis SPMI 2018 Pendidikan Dasar</p> <p>Panduan Simdak Dikdasmen Bidang Pendidikan Dasar SD dan SMP 2017</p>	 <p><i>Keterangan : Rehab Ruang Kelas SMP N 3 Pagelaran</i></p>	<p>Benar bahwa peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Pringsewu untuk saat ini sedang dilakukan sesuai dengan yang direncanakan diawal, akan tetapi dalam pelaksanaan tujuan alternatif kebijakan tersebut sedikit terhambat oleh sedikitnya dana anggaran pendidikan sehingga hal ini menghambat proses pelaksanaan kebijakan pendidikan khususnya dalam pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana yang</p>

			 <p><i>Keterangan: Keadaan Jamban/toilet siswa dan guru kurang layak pakai pada SD N 3 Pujodadi.</i></p>	membutuhka dana cukup banyak untuk memperbaiki ataupun membangun fasilitas pendidikan guna meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Pringsewu.
--	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2019)

b) Ketekunan

Ketekunan pengamatan bertujuan untuk menemukan ciri-ciri dan unsur-unsur dalam situasi yang sangat relevan dengan persoalan atau isu yang sedang dicari. Dengan melakukan ketekunan maka peneliti dapat memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang apa yang diamati. Untuk meningkatkan ketekunan peneliti menggunakan cara membaca referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi-dokumentasi yang terkait dengan temuan yang diteliti dilapangan. Dengan cara demikian, maka peneliti akan semakin cermat dalam membuat laporan yang pada akhirnya laporan yang dibuat akan semakin berkualitas.

2. Keteralihan (*Transferability*)

Pengujian keteralihan dalam penelitian kualitatif digunakan agar orang lain dapat memahami hasil penelitian sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut dengan membuat laporan yang rinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya. Pengujian keteralihan dalam penelitian ini dilakukan dengan memahami dan menerapkan hasil penelitian terdahulu yang telah dilakukan dengan fokus penelitian yang sama yaitu tentang Implementasi Kebijakan atau Program agar penelitian dapat terinci, jelas, sistematis, dan dapat dipercaya.

3. Kebergantungan (*Dependability*)

Pengujian kebergantungan dilakukan dengan audit terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan proses penelitian tetapi dapat memberikan data maka diperlukannya uji kebergantungan. Apabila proses penelitian tidak ada tetapi datanya ada maka penelitian itu tidak *reliable* atau

dependable. Dalam penelitian ini uji kebergantungan dilakukan oleh Dosen Pembimbing apakah hasil data yang diperoleh peneliti sudah benar adanya sesuai di lapangan.

4. Kepastian (*Confirmability*)

Pengujian kepastian dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian berarti menguji hasil penelitian yang sudah dilakukan. Pada tahap ini, uji kepastian dilakukan bersamaan dengan uji kebergantungan, perbedaannya terletak pada orientasi penilaiannya. Uji kepastian digunakan untuk menilai hasil dari penelitian sedangkan uji kebergantungan menilai proses penelitian. Dalam penelitian ini uji kepastian diperiksa dan diaudit kepastian datanya oleh pembimbing. Hasil data yang diperoleh diperiksa kembali apakah sudah benar adanya saat ada di lapangan, menguji kelogisan hasil penelitian serta menilai hasil penelitian. Setelah diuji kepastian dan dianggap benar maka diadakan seminar dan ujian yang dilakukan bersama pembimbing dan pembahas.

V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan terkait dengan kebijakan mutu pendidikan di Kabupaten Pringsewu ditinjau dari persepektif model inkremental yaitu sudah berjalan dengan baik, dimana model inkremnetal tersebut merupakan salah satu model yang digunakan peneliti untuk menganalisis kebijakan pendidikan khususnya kebijakan sarana dan prasarana pendidikan. Model Inkremental tersebut menjelaskan bahwa kebijakan sarana dan prasarana merupakan salah satu kebijakan yang selalu dilakukan perbaikan akan tetapi dalam hal ini tidak menunjukkan atau perubahan secara signifikan. Kebijakan pendidikan di Kabupaten Pringsewu selama ini dilakukan secara bertahap dan disesuaikan dengan kondisi kebutuhan di lapangan pelaksanaan kebijakan pendidikan juga disesuaikan dengan visi dan misi yang di Kabupaten Pringsewu. Ketercapaian hasil pelaksanaan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan di Kabupaten Pringsewu telah menyesuaikan dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh pihak sekolah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kabupaten pringsewu dalam memberi bantuan

perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana sekolah yaitu menyesuaikan dengan data yang sudah diupload melalui aplikasi Dapodik dan yang memiliki tingkat kerusakan diatas 65% atau mengalami kerusakan sedang dan berat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti terkait dengan model kebijakan inkremental untuk mewujudkan pendidikan yang berkualitas (studi pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu) yaitu :

1. Untuk meningkatkan kualitas kebijakan pendidikan di kabupaten pringsewu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pringsewu seharusnya lebih memperhatikan Standar pendidik dan tenaga kependidikan yang berperan penting dalam proses pembelajaran disekolah supaya dapat melaksanakan tugasnya secara profesional melalui program MGMP yang lebih sering dijalankan lagi sehingga dapat menambah wawasan bagi tenaga pendidik.
2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaaten Pringsewu perlu adanya penambahan dana anggaran pendidikan supaya dapat mempermudah dan mempercepat dalam pelaksanaan peningkatan saran dan prasarana sekolah dengan cara melibatkan partisipasi warga sekolah, komite sekolah serta wali murid supaya dalam hal ini bisa mengetahui serta sedikit membantu dalam pelaksanaan perbaikan/pembangunan sarana dan prasarana sekolah tersebut.

3. Menghadapi tantangan pendidikan Dinas pendidikan dan Kebudayaan Pringsewu lebih berupaya dalam peningkatan angka partisipasi sekolah dan angka rata-rata lama sekolah dengan cara mengadakan sosialisai di desa-desa yang menjelaskan bahwa pentingnya peran pendidikan dalam kehidupan pada zaman yang sudah modern saat ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, S. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Anugrah, F. 2018. *Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Tanggamus dalam Rangka Mendukung Ppercepatan Pembangunan Kawasan Industri Maritim di kabupaten Tanggamus*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik: Universitas Lampung.
- Apriyanti, Kiki. 2008. *Kebijakan Pengambilan Keputusan Kebijakan Publik Menembus batas Rasionalisme, Inkrementalisme, dan Irasionalisme di Pemerintah Kabupaten Pati*. *Jurnal Ilmu Adminstrasi dan Kebijakan Publik*. 5(2), pp. 194-210.
- Fardiyono, A. 2015. *Manajemen Sarana dan Prasarana Pendidikan di Sekolah Dasar Kanisius Eksperimental (SKDE) mangunan*. Manajemen pendidikan.
- Febrianto, P.T dan Sulaiman. 2014. *Kajian Strategis dan Prioritas Pembangunan Pendidikan Menengah untuk Pendidikan di Pulau Madura*. *Jurnal Ilmu Pendidikan*. 27(4), pp. 211-220.
- Hasbullah. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persda
- Hidayati. 2014. *Manajemen Pendidikan, Standar Pendidik, Tenaga Kependidikan, dan Mutu Pendidikan*. *Jurnal Al-Ta'lim*. 21(1), pp. 42-53.
- Idris,R dan Lestari,E. 2017. *Pengaruh Pengorganisasian terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan di SD Inpres Bangkala II kota Makassar*. *Jurnal Lentera Pendidikan*. 20(1), pp. 18-30.
- Muhardi. 2004. *Kontribusi Pendidikan dalam Meningkatkan Kualitas Bangsa Indonesia*. 10(4).
- Munirah. 2015. *Sistem Pendidikan di Indonesia: antara Keinginan dan Realita*. *Jurnal Tarbiyah dan Keguruan*. 2(2), pp. 233-245.

- Nugroho, R. 2018. *Public Policy*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Novita, Mona. 2017. *Sarana dan Prasarana yang Baik Menjadi Bagian Ujung Tombak Keberhasilan Lembaga Pendidikan Islam*. 4(2).
- Priarti, Megawanti. 2015. *Meretas Permasalahan pendidikan di Indonesia*. *Jurnal Formatif*. 2(3), pp. 227-234.
- Posumah, F. 2015. *Pengaruh Pembangunan Insfrastruktur terhadap Investasi di Kabupaten Mihasa Tenggara*. *Jurnal Berkala ilmiah efisiensi* .15(2), pp. 1-13.
- Ramahdani, A dan Ramdhani, M, A. 2017. *Konsep Umum Pelaksanaan Kebijakan Publik*. *Jurnal Publik*. 11(1), pp. 1-12.
- Santoso, Pandji. 2008. *Administrasi Publik*. Bandung: PT.Refika Aditama
- Sholichah, A. S. 2018. *Teori-teori Pendidikan dalam Al-qur'an*. *Pendidikan Islam*. *Jurnal Pendidikan Islam*. 7(1), pp. 23-46.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tresiana, N. 2017. *Kebijakan Publik*. Bandar Lampung: CV. Anugrah Utama Raharja
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.